

Imajinasi Simbolik Dalam Ingatan Sejarah Indonesia

Oleh: Ike Devi Sulistyaningtyas

Ketika waktu beranjak menuju penghujung bulan September, maka di situlah terdapat ingatan akan sebuah peristiwa dalam sejarah Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa tersebut kondang dengan nama Gerakan 30 September atau G30 S. Tanggal 30 September menjadi penanda waktu saat sebuah peristiwa terjadi. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengenal peristiwa G30S dengan diikuti teks penyerta yaitu PKI. Dalam konteks sejarah, PKI merujuk pada sebuah partai yang disebut sebagai Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian rangkaian lengkap label atas peristiwa bersejarah tersebut adalah G 30 S / PKI.

Nama PKI belakangan ini kembali mengemuka sejak Presiden Jokowi memunculkan niatan untuk mereproduksi film G30S/PKI dengan nuansa yang lebih milenial, sebagai respon atas wacana TNI memutar ulang film tentang G30S/PKI. Pada tahun 1984 Perum Produksi Film Negara (PPFN) telah memproduksi sebuah film mengenai PKI dengan judul "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI". Film tersebut selalu ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI) setiap tanggal 30 September.

Dengan demikian pemerintahan orde baru pada saat itu mengondisikan seluruh masyarakat Indonesia untuk menonton film tersebut.

Respon yang diberikan Jokowi menuai pro dan kontra, dengan berbagai macam versi. Akibatnya topik mengenai Jokowi dan PKI tidak hanya ramai di media massa konvensional, namun di media sosialpun isu tersebut menjadi viral dan hangat diperbincangkan. Beberapa meme mengemas isu ini dengan imbuhan nuansa humoris, dan yang lainnya memolesetkan nama PKI dengan berbagai macam istilah yang dapat menimbulkan perhatian baginetizen.

Hakikat Sejarah dalam Masyarakat

Pada hakekatnya sejarah merupakan urutan peristiwa masa lalu yang berisi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Oleh karena itu, sejarah meru-

PKI sebagai bagian dalam sejarah diletakkan dalam bentuk kesadaran simbolik yang mandiri, sebab pemaknaan mengenai PKI memiliki akar yang mendalam dan kuat tentang sebuah keanarkisan. Kesadaran dan imajinasi simbolik tentang PKI pada era orde baru, disampaikan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebenaran dan keniscayaan. Sistemik dalam konteks ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan, untuk membentuk kesan (image) tentang PKI melalui berbagai macam media yang dapat secara langsung menerpa masyarakat pada saat itu. Media yang digunakan dikemas melalui berbagai macam lini seperti tayangan berbagai macam film mengenai PKI, narasi sejarah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan berita-berita di media massa konvensional.

pakan peristiwa yang penting dan dapat dijadikan momentum, karena memiliki arti dalam menentukan kehidupan dan berpengaruh bagi orang banyak. Dalam konteks sejarah Indonesia, maka G30S merupakan salah satu penanda peristiwa dengan sistem nilai yang diberlakukan pada obyek PKI.

Sejarah tidak hanya menjadi milik masa lalu, pada dasarnya peristiwa dalam sejarah akan terus digulirkan pada masa kini bahkan masa mendatang. Guliran sejarah membutuhkan mekanisme penyampaian informasi yang berlangsung secara sistemik. Dengan demikian, maka informasi tentang sejarah yang dilakukan secara terus menerus tanpa henti, pada akhirnya diakui sebagai sebuah kebenaran, terlepas bahwa informasi tersebut benar atau salah.

Kesadaran dalam Ingatan Sejarah dan Imajinasi Simbolik

Peristiwa sejarah mengandung simbol-simbol yang melekat pada ingatan akan hadirnya sebuah peristiwa. Dalam sejarah, nama PKI menjadi simbol atas sebuah gerakan yang ditampilkan sarat dengan perilaku-perilaku anarkis. Hal ini mengakibatkan simbol PKI sebagai pelaku anarkis, terlalu kuat melekat dalam ingatan sejarah. Simbol tersebut tidak membutuhkan simbol lain untuk menjelaskan kelengkapan peristiwa anarkisnya. Dengan kata lain, nama PKI telah menjadi imajinasi simbolik tentang anarkisme. Barthes (Sunardi, 2002) menyebutkan bahwa imajinasi

simbolik dimaknai sebagai kemampuan manusia untuk menggunakan tanda, guna memandang hidup pada kategori yang dangkal atau yang dalam, superficial atau sampai dasar terdalam, palsu atau sampai akar.

PKI sebagai bagian dalam sejarah diletakkan dalam bentuk kesadaran simbolik yang mandiri, sebab pemaknaan mengenai PKI memiliki akar yang mendalam dan kuat tentang sebuah keanarkisan. Kesadaran dan imajinasi simbolik tentang PKI pada era orde baru, disampaikan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebenaran dan keniscayaan. Sistemik dalam konteks ini dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan, untuk membentuk kesan (image) tentang PKI melalui berbagai macam media yang dapat secara langsung menerpa masyarakat pada saat itu. Media yang digunakan dikemas melalui berbagai macam lini seperti tayangan berbagai macam film mengenai PKI, narasi sejarah dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan berita-berita di media massa konvensional.

Fungsi narasi dan tayangan audio visual tersebut, menjadi rangkaian pesan dalam proses komunikasi yang akhirnya berdampak tidak hanya pada pengetahuan, melainkan juga pada sikap dan perilaku masyarakatnya. Baik narasi maupun tayangan audio visual, memiliki kedudukan untuk menangkap realitas atau bukti yang tidak dapat dijangkau. Bukti yang disodorkan pada masyarakat

tersebut memiliki kekuatan retorik yang sangat besar, hingga akhirnya prinsip menyebarkan informasi tentang PKI, memberikan intervensi terhadap gambaran sejarah di Indonesia.

Begitupun yang terjadi saat Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI secara terus menerus pada masa kekuasaan orde baru ditayangkan tanpa henti, maka yang terjadi adalah terciptanya sejarah tunggal dengan kesan (image) PKI sebagai pelaku antagonis. Artinya, terdapat sejarah tunggal yang esensial tentang PKI. Dalam film tersebut PKI tampil sebagai objek yang tidak berubah, ditempatkan pada posisi yang sudah ditentukan (acknowledged places) secara ideologis oleh kreatornya.

Keberlanjutan Sejarah dan Masyarakat Imajiner

Persoalan yang mengemuka tentang PKI dan sejarah yang dimunculkan dalam sebuah film, adalah bagaimana menempatkan tanda-tanda audio visual sebagai tanda pranata sosial yang berisi sistem nilai, totalitas terstruktur dan satuan-satuan yang berhubungan satu dengan lainnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam pranata sosial, berdiri masyarakat yang dinamis dan selalu berada dalam proses pembentukan yang tidak pernah selesai. Masyarakat yang terus bergerak tanpa henti inilah yang menjadi ciri masyarakat imajiner.

Setiap unsur dalam masyarakat imajiner dapat menjadi bagian dalam konfigurasi baru. Maka, ketika Jokowi berusaha memadukan sejarah dengan konfigurasi kelompok masyarakat milenial, pada saat itu terjadi hasrat keterbukaan terhadap bagaimana sejarah diadopsi oleh generasi yang mengalami transmisi, sebagai akibat atas majunya teknologi informasi. Jadi, alih-alih berprasangka buruk terhadap gagasan Jokowi mengemas sejarah, lebih baik mengubah simbol-simbol yang kaku dan otoritarian, menjadi simbol yang lebih etis dan adab untuk dikonsumsi dan diingat sebagai sejarah Indonesia.

Ike Devi Sulistyaningtyas
Dosen dan Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi FISIP Universitas
Atma Jaya Yogyakarta.